

**PENGARUH *MANAGERIAL OWNERSHIP*, *EARNINGS MANAGEMENT*,
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)

SKRIPSI



**OLEH :
AMELIA**

**NIM :
1207099/2012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *MANAGERIAL OWNERSHIP, EARNINGS MANAGEMENT,*
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)

Nama : Amelia
NIM/TM : 1207099/2012
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, 24 Maret 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

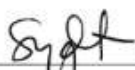
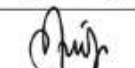
**PENGARUH MANAGERIAL OWNERSHIP, EARNINGS MANAGEMENT
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)

Nama : Amelia
TM/NIM : 2012/1207099
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, 24 Maret 2016

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D	1. 
2.	Sekretaris	Salma Taqwa, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia
NIM/Thn. Masuk : 1207099/2012
Tempat/Tgl Lahir : Serang / 29 Mei 1994
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp.Perhubungan Udara No.1 Air Tawar, Padang
No. Hp/Telepon : 082389757770
Judul Skripsi : Pengaruh *Managerial Ownership, Earnings Management* dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2016

Yang Menyatakan

A M E L I A
NIM 2012/1207099

ABSTRAK

Amelia. (1207099/2012). Pengaruh *Managerial Ownership*, *Earnings Management* Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014)

**Pembimbing : 1. Sany Dwita,SE,Ak,M.Si,Ph.D
2. Salma Taqwa, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *managerial ownership*, *earnings management* dan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan indikator GRI. *Managerial Ownership* diukur dengan persentase perbandingan antara kepemilikan manajer dalam perusahaan dengan jumlah saham yang beredar, *earnings management* diukur dengan proksi akrual diskresioner, dan dewan komisaris diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 45 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) *managerial ownership* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan, (2) *earnings management* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan, dan (3) dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility* perusahaan.

Kata Kunci : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Managerial Ownership*, Dewan Komisaris

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh *Managerial Ownership, Earnings Management* Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan (*Studi Empiris Pada Perusahaan yang Teraftar di BEI Periode 2012-2014*)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Salma Taqwa, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak dan Nurzi Sebrina S.E, M.Sc, Ak selaku penelaah yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Halmawati, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Ayahanda tercinta Asmar (Alm) dan Ibunda tercinta Dewi Suarti dan Kakanda tersayang Ivan Deas Kurniawan dan Adinda Rissa Deas Putri dan Dinda Deas Febriani serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Saudariku Intani Selcio yang selalu memberikan nasihat, dukungan, motivasi, do'a dan semangat selama ini dalam perjuangan untuk penyelesaian studi dan karya kecil ini.
10. Keluarga Basrizal Edi dan Sri Oktaviras dan Syafran dan Dewi Oktavianis di Padang serta keluarga Joni dan Fera Dessyanti dan Rafida (Alm) di Batusangkar yang turut membantu secara moril maupun materil dalam hingga penulis menyelesaikan studi hingga selesai.

11. Sahabat tercinta HQS (Irma Mustika, Hana Nurul Hanifah, Safina Turrahmah, Indah Septya Rini, Fitria Maiza, Yosefin Anggrieni Duha, Intan Krisna, Rio Pratama, Panji Maulana, Ihsan Syakirli dan Rinaldi) yang dengan senantiasa memberi dukungan, doa dan mencurahkan segenap pikiran tenaga selama ini sampai penulis bisa menyelesaikan studi disini serta mau mendengarkan semua keluh kesah dan memberi saran dalam perjuangan membuat karya kecil ini.
12. Para senior dan junior di se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ivand Satria yang memberikan semangat belajar, do'a, dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 24 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Teori Stakeholder	10
2. Teori Legitimasi	11
3. Teori Agensi	12
4. <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
5. <i>Managerial Ownership</i>	25
6. <i>Earnings Management</i>	27
7. Dewan Komisaris.....	28
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
C. Hubungan antar Variabel.....	31
D. Kerangka Konseptual	35
E. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data	42

D. Teknik dan Pengumpulan Data	42
E. Variabel Penelitian dan Pengukuranya	43
F. Teknik Analisis Data	47
G. Definisi Operasional	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum BEI	58
B. Deskriptif Variabel Penelitian	59
C. Analisis Deskriptif	78
D. Analisis Induktif	80
E. Uji Asumsi Klasik	83
F. Uji Model	87
G. Pembahasan.....	89
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Keterbatasan Penelitian	97
C. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Konsep Pengungkapan Informasi Pertanggung jawaban sosial Menurut Global Reporting Initiative.....	18
2.Kriteria Pengambilan Sampel.....	40
3.Daftar Perusahaan Sampel	41
4.Perhitungan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	60
5. Data Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	63
6.Data Kepemilikan Manajerial	65
7.Data Hasil OLS	69
8.Data <i>Discretionary Accruals</i>	71
9.Data Manajemen Laba	73
10.Data Dewan Komisaris Independen	77
11.Deskriptif Statistik	79
12.Hasil Uji Chow	80
13.Hasil Uji Hausman	81
14.Hasil Estimasi Regresi Panel	82
15.Hasil Uji Heterokedastisitas	86
16.Hasil Uji Multikolonieritas	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.Kerangka Konseptual	38
2.Hasil Uji Normalitas Transformasi	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Tabulasi Pemilihan Sampel	102
II. Tabulasi Data	115
III. Hasil Olahan Data dengan Eviews 6.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan umumnya dipandang secara sukarela meskipun beberapa negara sekarang mewajibkan pengungkapan CSR. Begitu pentingnya pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi telah dibuktikan dalam arikel-artikel yang diterbitkan dalam *The Accounting Review*. Pengungkapan CSR telah dibajak oleh bisnis dengan masalah tujuan hubungan masyarakat sendiri, telah digerakan untuk meningkatkan kontrol manajerial bisnis dan sebagian besar telah ditangkap oleh kepentingan ekonomi yang dominan dalam bisnis organisasi. Pengungkapan CSR memperluas akuntabilitas bisnis, maksudnya tidak hanya membuat laporan keuangan untuk pemilik tetapi juga untuk masyarakat luas (Moser dan Martin, 2012).

Moser dan Martin (2012) melihat pengungkapan CSR dari dua sudut pandang, yaitu perusahaan melakukan pengungkapan CSR untuk kepentingan pemegang saham dan melakukan pengungkapan CSR murni untuk kegiatan sosial. Jika berfokus untuk kepentingan pemegang saham, maka pengungkapan CSR memberikan informasi yang berguna bagi investor. Manajer akan dikaitkan dengan manajemen laba, karena kualitas laba yang dilaporkan relevan untuk kepentingan investor.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya peran perusahaan yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi di masyarakat,

meningkat pula dampak kepedulian masyarakat atas aktivitas perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan yang lebih berorientasi pada tingginya laba agar dapat lebih menunjukkan performa kinerjanya kepada para investor. Oleh karena itu, bukan hanya perusahaan penghasil limbah saja yang dituntut oleh pemangku kepentingan untuk melaporkan pertanggungjawaban sosialnya atau yang disebut *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, serta masyarakat pada umumnya (Pasal 1 butir 3 UU No.40/2007 tentang PT).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan terhadap dampak kegiatan bisnis perusahaan. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.

Perusahaan akan mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mengkomunikasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan, maka aktivitas

tanggung jawab sosial dan hal-hal terkait dilaporkan dalam laporan tahunan sebagai bentuk *corporate social and environmental responsibility reporting*. Dengan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan ini diharapkan perusahaan memperoleh *legitimasi* atas peran sosial dan kepedulian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan memperoleh dukungan dari masyarakat, dan kelangsungan hidup perusahaan dapat diperolzeh (Gray, 2006).

Di Indonesia, wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No 40 pasal 74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007, dinyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09.

Badjuri (2011) pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor fundamental perusahaan maupun mekanisme *Corporate Governance*. Faktor fundamental perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR melalui likuiditas, *leverage*, profitabilitas, presentase saham publik, dan ukuran perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang meliputi ukuran dewan komisaris, presentase komisaris independen, kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial dan komite audit. Perbedaan informasi antara pihak manajemen dengan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan kegiatan seperti manajemen laba mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Di Indonesia sendiri, fenomena mengenai pengungkapan dan penerapan CSR masih terus berkembang. Pada tahun 2009, PT Trubaindo Coal Mining menghadapi ancaman penghentian aktivitas perusahaan oleh warga sekitar. Hal ini terjadi karena perusahaan belum menepati janjinya untuk melunasi ganti rugi lahan warga Bentian Besar Kalimantan Timur dan membangun instalasi air bersih. Ancaman juga terjadi karena ganti rugi yang diberikan hanya sebesar Rp 10 juta per hektar, namun dalam laporan berkelanjutan PT Trubaindo mengakui ganti rugi dibayarkan Rp 40 juta per hektar, dimana Rp 30 juta diantaranya diberikan kepada kelompok pemerintah (www.csrindonesia.com). Pada tanggal 26 Januari 2012, LSM Merah Putih dan Cagar Tuban melakukan unjuk rasa ke kantor PT Holcim di Jl. Basuki Rahmad Kabupaten Tuban untuk menolak rencana pembangunan pabrik yang dikhawatirkan dapat menambah daftar kerusakan yang terjadi di wilayah Tuban (www.beritajatim.com). Pada tanggal 1 September 2015, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menjelaskan adanya penggeledahan di kantor Pertamina Foundation terkait dengan dugaan korupsi proyek CSR Pertamina salah satunya “Gerakan menanam 1000 Pohon” (news.okezone.com).

Kesadaran pengungkapan CSR dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan keuangan tahunan

maupun masing-masing *website* perusahaan. Termasuk dengan adanya *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA Award)*, dimana hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

Penelitian terdahulu sudah meneliti CSR dari berbagai aspek, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Intan (2015); Eriandani (2013); Grogiau (2014); Badjuri (2011); Terzaghi (2012); Djuitaningsih dan Wahdatul (2012) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah likuiditas, *leverage*, profitabilitas, presentase saham publik, dan ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, presentase komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit dan manajemen laba.

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan (Eriandani, 2013).

Penelitian Rustiarni (2011) dan Badjuri (2011) tidak menemukan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Eriandani (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun manajer perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulastiyanto, 2008). Menurut Belkaoui dan Riahi (2007) manajemen laba adalah aktifitas intervensi dari manajer dengan menggunakan manajemen akrual untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi karena meningkatnya laba membuat manajer mendapatkan bonus dari pihak perusahaan.

Grougiou dkk (2014) menemukan bahwa ada hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan CSR pada Bank komersial di Amerika Serikat. Prasetya (2015) dan Djuitaningsih (2012) juga menemukan hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan CSR. Penelitian lain yang dilakukan Terzaghi (2012) tidak menemukan pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR. Tindakan manajemen laba biasanya ditutupi dengan pengungkapan CSR oleh perusahaan secara lebih baik.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan aturan yang berlaku. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KKNG, 2006). Djuitaningsih

dan Marsyah (2012) dan Suaryana dan Febriana (2012) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain yang dilakukan oleh Badjuri (2011) menemukan bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Belal dan Momin (2009) meneliti pada negara berkembang bahwa pengungkapan CSR dilakukan karena adanya tekanan dari pihak eksternal perusahaan. Pengungkapan CSR pada negara berkembang karena ada pengaruh dari pemegang saham. Pengungkapan CSR difokuskan pada perubahan iklim, kemiskinan dan hak asasi manusia. Kamla (2007) menyatakan bahwa pengungkapan CSR di Arab dipengaruhi oleh pemodal swasta dari Arab. CSR digunakan untuk meningkatkan citra atau reputasi perusahaan. Moser dan Martin (2012) juga menemukan hasil yang sama bahwa pengungkapan CSR di dorong karena ada pengaruh dari pemegang saham.

Penelitian ini dimotivasi karena adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya. Penelitian CSR di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor *Good Corporate Governance*. Tujuan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya tanggung jawab dan kesadaran perusahaan pada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Salah satu faktor *corporate governance* yang berpengaruh terhadap penelitian CSR adalah struktur kepemilikan dan dewan komisaris .

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate*

Social Responsibility) yang masih menunjukkan hasil yang beragam, bahkan bertentangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Managerial Ownership*, *Earnings Management*, dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2014).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejahteramana *Managerial Ownership* mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Sejahteramana *Earnings Management* mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Sejahteramana Dewan Komisaris mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti:

1. Pengaruh *managerial ownership* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Pengaruh *earnings management* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Pengaruh dewan komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dalam hal pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan tentunya menambah pengalaman penulis dalam dunia penelitian.
2. Bagi Dunia Pendidikan
Menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan pembaca.
3. Bagi Objek Penelitian
Menjadi bahan referensi untuk perusahaan dalam menilai kinerja pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan tentunya menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja di masa depan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang melandasi penelitian ini, mulai dari teori *stakeholder*, teori *legitimacy*, dan teori keagenan penjelasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, dan definisi variabel penelitian, yaitu *managerial ownership*, *earnings management*, dan dewan komisaris.

1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa kesuksesan atau hidup matinya suatu korporasi sangat tergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholder*-nya seperti investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Bila mampu melakukannya, korporasi akan meraih dukungan *stakeholder* (Lako, 2011).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan (Untung, 2008). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan.

Dengan adanya teori *stakeholder* ini kita dapat memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* karena

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampak aktivitas yang dilakukan terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif.

2. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Menurut teori kontrak sosial (*social contract*), keberadaan korporasi dalam suatu area karena didukung secara serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat (Lako, 2011).

Teori legitimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat. Perusahaan membutuhkan pengakuan masyarakat dengan cara mengungkapkan CSR agar perusahaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Diterimanya suatu perusahaan oleh masyarakat, merupakan suatu bentuk legalitas bagi perusahaan. Pengungkapan CSR oleh perusahaan memberikan image positif dimata para *stakeholder*, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

Dengan adanya teori legitimasi kita dapat memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan berada agar operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar

tanpa adanya konflik dari masyarakat sekitar. Untuk hal tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan cara mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar dapat menerima baik keberadaan perusahaan di lingkungannya.

3. Teori Agensi

Menurut Harmono (2011), teori keagenan dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agen dan para pemegang saham sebagai *principal* atau pendelegator. Dalam hal ini, *principal* yang mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Namun terkadang manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Manajemen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek sehingga menimbulkan konflik keagenan.

Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Munculnya konflik akan mempersulit pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk memonitor manajer perusahaan. Aset perusahaan mungkin saja digunakan untuk kepentingan manajer dari pada untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Sofyaningsih dan Hardiningsih dalam

Eriandani (2013), munculnya konflik ini akan meningkatkan biaya keagenan, namun biaya keagenan ini dapat diminimumkan melalui kepemilikan institusi sebagai pihak yang memonitor manajer atau agen.

Munculnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Investor sebagai prinsipal diasumsikan hanya menginginkan hasil investasi mereka bertambah atau mendapat keuntungan. Sedangkan para agen yaitu manajer diasumsikan akan merasa puas bila mereka menerima kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Prinsipal (investor) menginginkan keuntungan yang besar yaitu pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang diberikan, sedangkan agen (manajer) menginginkan pemberian kompensasi, bonus, dan insentif yang jumlahnya juga sebesar mungkin atas kinerjanya. Bila tidak ada pengawasan yang memadai maka agen dapat memainkan atau memanipulasi beberapa kondisi perusahaan seperti laba agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas inisiatif atau permintaan dari prinsipal ataupun inisiatif agen sendiri. Maka terjadilah *creative accounting* yang menyalahi aturan, misal: adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan; *capitalisasi expense* yang tidak semestinya; pengakuan penjualan yang tidak semestinya; yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang dapat “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan *income*

smoothing (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun.

Konflik keagenan ini dapat dikurangi dengan menerapkan *corporate governance* sebagai mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi yang lengkap antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya (Putri, 2011).

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Definisi CSR

Definisi mengenai CSR saat ini sangatlah beragam. Seperti definisi CSR yang dikemukakan oleh World bank (2002), sebagai berikut:

“..... CSR is commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of live, in ways that are both good for business and good for development.”

Yang dimaksud didalam definisi adalah CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang dapat bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas hidup, dengan cara yang baik bagi bisnis maupun pengembangan (Sumedi, 2010). Sedangkan sebuah organisasi dunia *World Bisnis Council for Sustainable Development* (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas

setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarga.

Tujuan dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kondisi dunia yang tidak menentu seperti terjadinya *global warming*, kemiskinan yang semakin meningkat serta memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan perilaku etis dan ketentuan hukum yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi seluruh *stakeholders*. CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan.

b. Pengungkapan CSR

Kata pengungkapan secara umum memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi berupa penyajian dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan (*disclosure*) berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan informasi.

Pengungkapan (*disclosure*) dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan terkadang membuat pengungkapan yang lebih luas guna mendapatkan keuntungan. Tampaknya, kompetisi atas investasi dana merupakan faktor

pendorong utama dalam meningkatkan pengungkapan oleh perusahaan. *Disclosure* juga menjadi salah satu upaya mewujudkan transparansi dalam dunia bisnis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Suwardjono, 2005).

Menurut Internasional Organization for Standardization (ISO), konsep CSR harus dipahami sebagai “*initiatives beyond legal compliance and the achievement of the legitimate mission of an organization are voluntary*”. CSR adalah inisiatif hukum yang merupakan pencapaian misi dari sebuah perusahaan yang bersifat sukarela.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif membentuk tim (*working group*) yang memprakarsai lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa *social responsibility* adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi.

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. ISO 26000 akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *sosial responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok, yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, prosedur dan operasi yang wajar, isu konsumen, dan partisipasi dan pengembangan masyarakat konsumen.

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pengungkapan CSR dengan menggunakan standar GRI G3 (*Global Reporting Initiative*) yang terdiri dari 79 pengungkapan. *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai sebuah jaringan pelopor perkembangan dunia yang berbasis organisasi dan paling banyak digunakan dalam laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Pengukuran pelaporan tanggung jawab sosial adalah dengan pedoman yang digunakan oleh GRI. Perusahaan menggunakan pedoman GRI dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sosial. Penelitian di Indonesia maupun diluar banyak

yang memakai pedoman GRI sebagai alat ukur CSR, seperti Malaysia juga menggunakan GRI sebagai pedoman dalam mengukur tanggung jawab perusahaan.

GRI digagas oleh PBB melalui *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. Indikator-indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan GRI dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Konsep Pengungkapan Informasi Pertanggung jawaban sosial
Menurut *Global Reporting Initiative*

A	DAMPAK EKONOMI (EC)	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: Kinerja Ekonomi (<i>Economic Performance</i>)	EC1 (CORE) Nilai ekonomi yang dihasilkan : pendapatan, biaya usaha, kompensasi karyawan, donasi dan investasi pada masyarakat, saldo laba dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
		EC2 (CORE) Implikasi perubahan iklim (<i>climate change</i>) terhadap keuangan, risiko, dan kesempatan dalam berusaha.
		EC3 (CORE) Cakupan rencana pensiun yang akan diberika oleh perusahaan kepada karyawannya, baik untuk menutup pembayaran pensiun selain jangka waktu panjang, maupun untuk meningkatkan motivasi karyawan.
		EC4 (CORE) Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah.
	Aspek: Keberadaan Pasar (<i>Market Performance</i>)	EC5 (ADD) Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) berdasarkan wilayah kerja.
		EC6 (CORE) Kebijakan, praktik, dan besarnya transaksi pembelian dengan <i>supplier</i> lokal sesuai lokasi kegiatan perusahaan
		EC7 (CORE) Prosedur perekrutan karyawan lokal dan proporsi

		manajemen senior yang diangkat dari komunitas lokal tempat perusahaan beroperasi.
	Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung (Indirect Economic Impact)	EC8 (CORE) Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa untuk kepentingan publik.
		EC9 (CORE) Gambaran signifikansi dampak ekonomi tidak langsung, termasuk seberapa besar dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.
B.	DAMPAK LINGKUNGAN (EN)	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: Bahan Baku (<i>materials</i>)	EN1 (CORE) Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya
		EN2 (CORE) Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang (<i>recycle</i>) setelah bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi.
	Aspek: Energi (<i>energy</i>)	EN3 (CORE) Pemakaian / konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.
		EN4 (CORE) Pemakaian / konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utamanya.
		EN5 (ADD) Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan perbaikan efisiensi energi.
		EN6 (ADD) Inisiatif dan usaha perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)
		EN7 (ADD) Usaha untuk mengurangi pemakaian energi tidak langsung dan tercapainya target penghematan.
	Aspek: Air (<i>Water</i>)	EN8 (CORE) Total pengambilan air berdasarkan sumbernya.
		EN9 (ADD) Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh pengambilan air.
		EN10 (ADD) Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan lagi

	Aspek: Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>)	EN11 (CORE) Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.
		EN12 (CORE) Uraian tentang dampak signifikan dari aktivitas perusahaan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati yang berada pada daerah yang dilindungi maupun tidak dilindungi.
		EN13 (ADD) Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
		EN14 (ADD) Strategi, tindakan saat ini, dan rencana ke depan untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.
	Aspek: Emisi, Effluents, dan Limbah (Emission, Effluents, and waste)	EN15 (ADD) Total spesies yang dilindungi secara internasional maupun nasional yang hidup di habitat pada area yang terkena dampak operasional, berdasar tingkat resiko kepunahan.
		EN16 (CORE) Total emisi gas rumah kaca (<i>green-house gas</i>) langsung atau tidak langsung berdasarkan berat emisi.
		EN17 (CORE) Emisi gas rumah kaca (<i>green-house gas</i>) lainnya yang relevan berdasarkan berat emisi.
		EN18 (ADD) Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (<i>green-house gas</i>) dan tingkat pengurangan yang dicapai.
		EN19 (CORE) Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi.
		EN20 (CORE) Emisi gas lainnya berdasarkan jenis dan berat.
		EN21 (CORE) Total air yang dibuang berdasarkan kualitas air dan tujuan aliran.
		EN22 (CORE) Total berat limbah berdasarkan tipe dan metode pembuangan.
		EN23 (CORE) Total jumlah dan volume kebocoran yang signifikan.

		EN24 (ADD) Berat limbah berbahaya yang dipindah, diimpor, diekspor, atau diperlakukan sesuai <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan IV</i> , dan persentase limbah pindahan yang dikirim internasional dengan kapal.
		EN25 (ADD) Identitas, ukuran, status dilindungi, dan nilai keanekaragaman hayati dari air dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh pembuangan sampah perusahaan.
	Aspek: Produk dan Jasa (<i>product and services</i>)	EN26 (CORE) Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh.
		EN27 (CORE) Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material kemasan tersebut dapat didaur ulang.
	Aspek: Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	EN28 (CORE) Besarnya denda keuangan dan sanksi lain karena tidak memenuhi regulasi lingkungan.
	Aspek: Transpor (<i>Transport</i>)	EN29 (ADD) Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang digunakan perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan.
	Aspek: Lingkungan Menyeluruh (<i>Overall</i>)	EN30 (ADD) Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi /memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya.
C	TANGGUNG JAWAB PRODUCT (<i>Product Responsibility</i>)	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: Kesehatan dan keamanan pelanggan (<i>Customer Health and Safety</i>)	PR1 (CORE) Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
		PR2 (ADD) Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

	Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa (<i>Product and Service Labelling</i>)	PR3 (CORE) Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
		PR4 (ADD) Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
		PR5 (ADD) Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
	Aspek: Komunikasi Pemasaran (<i>Marketing Communication</i>)	PR6 (CORE) Program-program untuk ketaatan kepada hukum, standar dan yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan sponsorship.
		PR7 (ADD) Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
	Aspek: Keleluasaan Pribadi Pelanggan (<i>Customer Privacy</i>)	PR8 (ADD) Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (<i>privacy</i>) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
	Aspek: Kepatuhan (Compliance)	PR9 (CORE) Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (noncompliance) hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.
D	PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK (<i>Labor Practices & Decent Work (LA)</i>)	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: Pekerjaan (<i>Employment</i>)	LA1 (CORE) Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
		LA2 (CORE) Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

		LA3 (ADD) Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap(purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
	Aspek: Tenaga kerja /Hubungan Manajemen (<i>Labor/Manageme nt Relations</i>)	LA4 (CORE) Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan(<i>Occupatio nal Health and Safety</i>)	LA6 (ADD) Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
		LA7 (CORE) Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
		LA8 (CORE) Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
		LA9 (ADD) Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
	Aspek: Pelatihan dan Pendidikan (<i>Training and Education</i>)	LA10 (CORE) Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
		LA11 (ADD) Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
		LA12 (ADD) Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
	Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara (<i>Diversity and Equal Opportunity</i>)	LA13 (CORE) Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

		LA14 (CORE) Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.
E	HAK ASASI MANUSIA (<i>Human Rights Performance Indicators</i>)	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: <i>Investment and Procurement Practices</i>	HR1 (CORE) Total perjanjian investasi yang dirancang dengan mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
		HR2 (CORE) Persentase supplier dan kontraktor penting yang peduli dan selalu mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
		HR3 (ADD) Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
	Aspek: <i>Nondiscrimination</i>	HR4 (CORE) Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
	Aspek: <i>Freedom of Association and Collective Bargaining</i>	HR5 (CORE) Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk asosiasi dan tawarmenawar kolektif serta dukungan perusahaan terhadap hal tersebut.
	Aspek: Tenaga kerja anak-anak (<i>Child Labor</i>)	HR6 (CORE) Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
	Aspek: Forced and Compulsary Labor	HR7 (CORE) Kegiatan yang dapat menimbulkan resiko munculnya paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan munculnya kejadian tersebut.
	Aspek: <i>Security Practices</i>	HR8 (ADD) Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
	Aspek: <i>Indigenous Rights</i>	HR9 (ADD) Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak-hak kaum pribumi (penduduk setempat) dan tindakan

		yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
F	Masyarakat / Sosial	INDIKATOR KINERJA
	Aspek: Komunitas (Community)	SO1 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
	Aspek: Korupsi (Corruption)	SO2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
		S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
		S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
	Aspek: Kebijakan Publik (Public Policy)	S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
		S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
	Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing (Anti- Competitive Behavior)	S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
	Aspek: Kepatuhan (Compliance)	S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

5. *Managerial Ownership*

Managerial Ownership atau kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan.

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Agency theory (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Eriandani (2013) mengatakan bahwa top manajer memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk seluruh stakeholder. Teori tersebut juga menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik keagenan dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan. Jika manajer memiliki saham dalam jumlah besar, maka mereka akan cenderung mengambil keputusan dengan tujuan memaksimalkan *shareholder value*. Jika tanggung jawab sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan, kepemilikan terhadap saham akan memberikan insentif pada manajer untuk melakukan aktivitas CSR.

Return yang dihasilkan aktivitas CSR tidak akan terlihat dalam jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image perusahaan dalam

jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi *blockholder* (pemilik saham internal – *board of director*, manager, dan dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam jumlah besar. Manajer yang memiliki kepemilikan saham lebih banyak, akan menggunakan *resource*-nya sepanjang dapat memaksimalkan nilai *shareholder*, sehingga konsisten dengan *agency theory*.

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Total saham manajerial adalah saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun, sedangkan total saham yang beredar adalah seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan pada akhir tahun.

6. *Earnings Management*

Sulistyanto (2008) manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. *Earnings Management* secara luas ditafsirkan sebagai ancaman laten dan praktek yang tidak diinginkan, yang dapat berpotensi mengakibatkan efek merusak dalam jangka panjang.

Manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, menurut (Belkaoui, 2007:201). Manajemen laba adalah aktifitas intervensi dari manajer dengan menggunakan manajemen akrual untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi karena meningkatnya laba membuat manajer mendapatkan bonus dari pihak perusahaan.

Beberapa tahun terakhir sudah banyak riset yang membahas tentang manajemen laba. Prior et al (2008) merupakan peneliti pertama yang mengeksplorasi hubungan antara CSR dan manajemen laba. Penelitiannya dilakukan pada 26 negara.

Sulistiawan dkk (2011) menyatakan bahwa kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba karena kecenderungan untuk menghindari laba negatif telah meningkat sepanjang waktu. Pengguna laporan keuangan memerlukan cara untuk mendeteksi manipulasi laba agar tidak menjadi korban dari trik akuntansi yang agresif atau skandal akuntansi yang mungkin akan terjadi.

Manajemen laba dapat dideteksi secara kualitatif melalui kebijakan akuntansi. Pada penelitian ini dideteksi dengan *Modified Jones Model* (1995) yang dikembangkan oleh Dechow et al (1995). Model ini berfokus pada proksi *akrual diskresioner* sebagai indikator manajemen laba.

7. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat (5) perusahaan perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota dewan komisaris. Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham dan melakukan pengawasan.

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Dewan komisaris menerima usulan-usulan dari komite untuk mengambil keputusan.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Komite-komite penunjang dewan komisaris menurut KNKG (2006) dalam Prasetia (2014) antara lain :

- a) Komite Audit
- b) Komite Remunerasi dan Nominasi
- c) Komite Kebijakan Resiko
- d) Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Dewan komisaris diukur dengan proporsi dewan komisaris independen. Proporsi ini dilihat dari jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terus berkembang saat ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan indikator dan hasil beragam yang menjelaskan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian mengenai CSR sudah banyak dilakukan di negara berkembang. Kamla (2007) meneliti di negara berkembang yang berfokus pada Asia-Pasifik dan Afrika. Kamla menggunakan metode lain yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mengenai motivasi perusahaan melakukan CSR secara langsung kepada manajer perusahaan.

Penelitian Eriandani (2013) tentang pengaruh *institutional ownership* dan *managerial ownership* terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan majerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Anggraini (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Grougiou dkk (2014) yang mengidentifikasi driver kualitas pelaporan keuangan, yang ditunjukkan oleh manajemen laba. Ada hubungan timbal balik antara CSR dan manajemen laba pada Bank komersial di Amerika Serikat. Meskipun banyak bank-bank yang terlibat dalam praktik manajemen laba tapi juga aktif terlibat dalam pengungkapan CSR. Hubungannya terbalik dan signifikan, yaitu bahwa tingkat komitmen bank untuk CSR tidak terkait dengan kualitas pelaporan keuangan.

Ibrahim dkk (2015) meneliti tentang pratek manajemen laba dan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan yang menawarkan layanan dan produk Islam. Mereka mengambil sampel dari perusahaan di Malaysia yang menawarkan produk syariah. Hasilnya menyatakan bahwa perusahaan yang menawarkan produk syariah dalam kinerja keuangannya selama tiga tahun belakangan meningkatkan

laporan keberlanjutan perusahaan dan pelaporan keberlanjutan tidak dimanipulasi untuk menutupi manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Prasetia (2014) meneliti tentang analisis pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitiannya yaitu manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Kepemilikan manajerial dan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian oleh Badjuri (2011) tentang faktor-faktor fundamental, mekanisme *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan manufaktur dan sumber daya alam yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini membuktikan tidak ada pengaruh antara *leverage*, likuiditas, kepemilikan publik, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Sebaliknya, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dengan adanya dewan komisaris independen, rasio profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).

C. Hubungan antar Variabel

a. *Managerial Ownership* dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase

kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Rustiarini, 2011).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan manajemen sendiri yang menetapkan keputusan, mengambil keputusan serta merasakan dampak langsung dari hasil keputusan yang mereka ambil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Penelitian Eriandani (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial dengan pengungkapan CSR. Hal senada juga disampaikan Amal (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

b. *Earnings Management* dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam merekayasa laba dengan motivasi tertentu (Scott, 2009). Hal ini dapat dijelaskan dalam teori keagenan. Dalam teori ini dapat diperoleh informasi bahwa manajemen sebagai agen memiliki informasi yang lebih besar dari prinsipal sehingga pelaporannya dapat digunakan oleh manajemen dengan tujuan tertentu pula.

Dalam teori keagenan yang dijelaskan oleh Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Danang (2011), hubungan *principal* (pemilik perusahaan) dengan *agent* (manajer) adalah *principal* memperkerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. Dalam teori ini *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang berbeda sehingga terjadi konflik kepentingan. Pihak pemilik perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajer dan keadaan perusahaan, sedangkan manajer sendiri memiliki informasi yang cukup banyak tentang keadaan perusahaan. Dengan didorong oleh kepentingannya sendiri, akhirnya manajer dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan manajemen laba yang membuat laporan keuangan yang dilaporkan saat itu tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sebagai konsekuensinya, pemilik perusahaan tidak dapat membuat keputusan investasi secara optimal.

Menurut Mc Williams et al dalam Danang (2011), usaha yang memungkinkan dilakukan oleh manajer untuk mengamankan posisi mereka adalah dengan membuat dan melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* dan lingkungan sosial masyarakat, dalam hal ini *corporate social responsibility* (CSR). Untuk

menarik dukungan dari kelompok tersebut, kegiatan CSR yang biasa dilakukan adalah memasukkan aspek sosial ke dalam proses produksi, mengadopsi praktek pengembangan sumber daya manusia secara progresif, meningkatkan kegiatan yang ramah lingkungan melalui kegiatan daur ulang dan pengurangan polusi dan limbah, atau dengan mempercepat tujuan dari organisasi masyarakat.

Penelitian Ibrahim (2015) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan tidak dimanipulasi untuk menutupi praktik manajemen laba oleh perusahaan. Grougiou (2014) menemukan hubungan timbal balik antara praktik manajemen laba dengan pengungkapan CSR perusahaan. Hubungan manajemen laba dengan pengungkapan CSR tidak signifikan.

c. Dewan Komisaris dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Komisaris Independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, maupun pemegang saham publik.

Berkaitan dengan teori *agency*, dengan melaporkan laporan keuangan yang lebih lengkap maka setidaknya manajemen dapat mengurangi masalah keagenan yang rawan muncul dalam hubungan manajer dan pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris yang berperan sebagai pihak intern yang mengawasi manajemen dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Badjuri (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Terzaghi (2011) juga membuktikan hal yang sama bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dari kerangka konseptual akan terlihat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Konsep CSR menyebabkan semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan dan menjadi agenda rutin bagi aktivitas perusahaan. Untuk itu perlu diadakan pelaporan mengenai aktivitas sosial perusahaan (CSR) tersebut.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pada dasarnya bersifat orientasi dari dalam ke luar perusahaan. Salah satu hal yang mendorong pelaksanaan dan pengungkapan CSR adalah terlaksananya mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik. *Good corporate governance* sendiri merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Prinsip responsibilitas dalam GCG mengharuskan perusahaan untuk bertanggung

jawab kepada seluruh *stakeholders* atas setiap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. GCG sendiri akan mampu diterapkan dengan baik melalui dorongan mekanisme Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan manajerial. Pelaporan CSR dapat dijadikan alat untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh manajer yaitu dalam melakukan manajemen laba. Dengan adanya pengungkapan CSR ini, maka diharapkan dapat mengacaukan perhatian investor.

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen atau memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan perusahaan dan *stakeholders* yang terlibat. Komisaris Independen diharapkan tidak terpengaruh oleh manajemen sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas. Semakin besar proporsi Dewan Komisaris maka semakin luas pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan.

Mekanisme GCG melalui proporsi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan juga akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Pemegang saham memiliki kepentingan terhadap sustainability jangka panjang perusahaan, maka mereka akan berusaha memaksimalkan tidak hanya kondisi ekonomi perusahaan, tetapi juga sosial dan lingkungan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajer akan melakukan CSR. Di Indonesia telah diwajibkan pelaksanaannya dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka bisa dikatakan jika

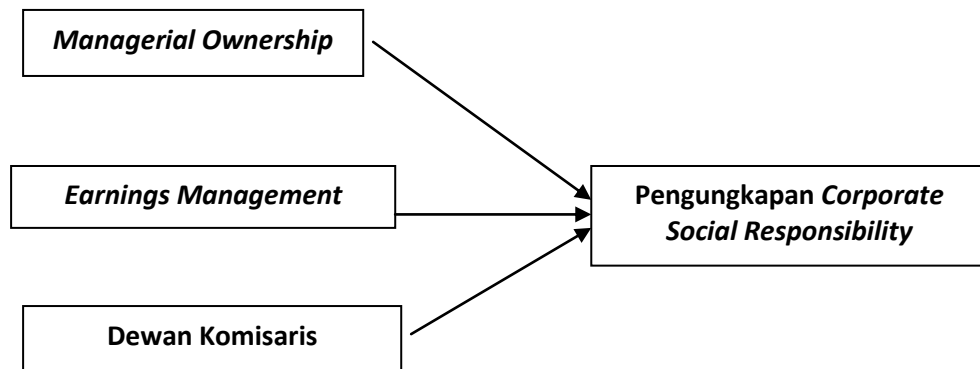
kepemilikan manajer semakin besar, maka aktivitas dan pengungkapan CSR juga akan semakin meningkat.

Dalam teori keagenan, investor bertindak sebagai prinsipal menginginkan hasil investasi mereka bertambah atau mendapat keuntungan yang meningkat. Sedangkan manajemen yang bertindak sebagai agen dari principal berkeinginan untuk meningkatkan kompensasi keuangan yang akan diterimanya. Adanya perbedaan kepentingan tersebut dan juga perbedaan dalam informasi yang didapat antara principal dan agen maka, hal tersebut dapat menyebabkan munculnya konflik keagenan. Sifat oportunistik yang dimiliki oleh agen, sehingga mereka memanfaatkan *asimetri* informasi yang mereka miliki. Pemanfaatan asimetri informasi yang dilakukan agen adalah berupa manipulasi dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pihak prinsipal.

Semakin besar pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan menurunkan gap informasi antara pengelola dan masyarakat, terutama pemegang saham. Hal ini akan menurunkan risiko yang terjadi karena asimetri informasi.

Perusahaan yang melakukan berbagai bentuk manajemen laba baik untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan perusahaan akan cenderung untuk melakukan pengurangan pengungkapan informasi. Adanya pengungkapan yang lebih maka hal ini mengakibatkan adanya hubungan yang positif antara manajemen laba dan pengungkapan informasi oleh perusahaan, dimana perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung semakin aktif dalam meningkatkan citra dan menarik dukungan dari publik dan *stakeholder* melalui kebijakan CSR.

Berdasarkan berbagai pembahasan diatas, maka variabel dalam penelitian di gambarkan pada model kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar1.
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian diatas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

- H₁ *Managerial Ownership* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H₂ *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H₃ Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *managerial ownership*, *earnings management*, dan dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel *managerial ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014.
2. Variabel *earnings management* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014.
3. Variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel yang sangat terbatas, hanya 45 dari 517 perusahaan yang ada, dikarenakan hanya 45 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan.
2. Terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan, karena tidak adanya suatu ketentuan baku yang dapat dijadikan standar dan acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator *GRI* yang sama dapat berbeda antar setiap peneliti.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas, mencakup seluruh populasi yang ada pada pasar modal. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.
2. Menyempurnakan daftar item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, agar tidak ada unsur subjektifitas yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penentuan indeks indikator *GRI*.
3. Selain data sekunder juga menggunakan data lain, seperti kuesioner ataupun interview ke perusahaan atau institusi pemerintah untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

4. Untuk penilaian dewan komisaris independen sebaiknya tidak dilihat dari banyaknya jumlah komisaris independen saja, tetapi ditelusuri lebih lanjut latar belakang dewan komisaris independen perusahaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Amal, Muhammad Ihlashul. 2011. "Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anggraini, Fr.Reni.Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX*:Padang.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Semarang : Universitas Stikubank.
- Belal, R Ataur & Mahmood Momin. 2009. "Corporate Social Reporting (CSR) in Emerging Economies : a review and future direction". *Research in Accounting in Emerging Economies* . Brasil : Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Belkoui & Ahmed Riahi. 2007. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bruynseels, Liesbeth & Eddy Cardinaels. 2014. "The Audit Committee: Management Watchdog or Personal Friend of The CEO?". *The Accounting Review Vol 89 No. 1*. Tilburg University and KU Leuven.
- Djuitaningsih, Tita & Wahdatul A Marsyah. 2012. Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Jakarta : Universitas Bakrie.
- Eriandani, Rizky. 2013. "Pengaruh Institusional Ownership dan Managerial Ownership terhadap Pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan Studi Empiris Perusahaan Manufaktur". *Simposium Nasional Akuntansi XVI* . Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Fama, E. F. dan Jensen Meckling. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*. 26, 301-325.
- Gray, Rob. 2006. "Social, Enviromental and Sustainability Reporting and Organisational Value Creation?" : *Centre for Social and Environmental*

Accounting Research ; School of Management, University of St Andrews, St Andrews, UK.

GRI. (2010). *Panduan Sustainability Reporting Guidelines*, Global Reporting Initiative, London". <http://www.globalreporting.org>. Diakses Tanggal 13 September 2015.

Grogiou, Vassiliki, Stergios Leventis, Emmanouil Dedoulis and Stephen Owusu-Ansah. 2014. "Corporate social responsibility and earnings management in U.S. bank". *Accounting Forum*.

Harmono. 2011. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, Mohd Sabrun, Faizah Darus, Haslinda Yusoff and Rusnah Muhamad. 2015. "Analysis of Earnings Management Practices and Sustainability Reporting for Corporations that offer Islamic Products & Services" : *International Conference On Financial Criminology* ; Wadham College, Oxford, United Kingdom.

Kamla, Rania. 2007. "Critically Appreciating Social Accounting and Reporting in the Arab Middle East : A Postcolonial Perspective". *Advances in International Accounting Vol 20 No. 105-177*. Heriot Watt University.

Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Moser, Donald V & Patrick R Martin. 2012. "A Broader Social Perspective on Corporate Social Responsibility Research in Accounting". *The Accounting Review Vol 87 No. 3*. University of Pittsburgh.

Prasetia, Alif Rishal & Intan Dwi Yulianti. 2015. "Interrelationship Between Earnings Management And Corporate Social Responsibility Reporting". *Airlangga Accounting International Conference*. University of Diponegoro.

Prasetia, Dimas. 2014. "Analisis Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi". Semarang: Universitas Diponegoro.

Prior, D. J. Surroca dan J. A. Tribo. 2008. Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance : An International Review* 16 (3) : 443-459

- Putri, Dwi Cynthia. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam *Sustainability Report*". Padang: FE UNP.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2011. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*". Denpasar: Universitas Mahasaraswati.
- Scott, William R. 2009. *Financial accounting theory edition 5*. Canada: Pearson Education.
- Suaryana, Agung & Febriana. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Bali: Universitas Udayana.
- Sulistiawan, Dedhy dkk. 2011. *Creative Accounting*. Jakarta: Salemba Empat
- Sulistyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Gramedia.
- Sumedi, A.M.P.K. 2010. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Terzaghi, Muhammad Titan. (2012). "Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol 2 No. 1.
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.